



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIRA MARLIATI
2. Jabatan : SEKRETARIS JURUSAN TATA RIAS DAN BUSANA
3. NHK : 810675

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.640.500.000**

1. Tanah Seluas 1050 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/125 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.115.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/63 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 213.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 3.9 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HADIAH Rp. 34.750.000
6. Tanah Seluas 3.9 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HADIAH Rp. 34.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 108.950.000**

1. MOBIL, SUZUKI SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, ISUZU PICK UP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA CS1 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 49.540.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 124.058.827**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.923.048.827
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.923.048.827

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.